
◆◆◆◆◆

HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 6, no 2, Juli-Desember 2025

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index

Political Defection dan Perpecahan Internal PKB pada Pilkada Pasuruan 2024

Fajri Assidiq

Universitas Airlangga, Surabaya

fajri.assidiq-2023@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena *political defection* dan perpecahan internal di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam proses pengusungan calon pada Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan wawancara mendalam dengan pengurus partai di tingkat cabang dan daerah, analisis dokumen organisasi, serta penelusuran pemberitaan media untuk memahami dinamika konflik yang terjadi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai analisis tematik untuk mengidentifikasi pola penyebab perpecahan, dinamika pengusungan calon, dan dampaknya terhadap strategi elektoral. Triangulasi sumber dan teknik diterapkan guna meningkatkan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpecahan internal dipicu oleh tarik-menarik kepentingan elite yang saling bersaing dalam menentukan figur calon kepala daerah. Mekanisme penjaringan calon yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi kader di akar rumput turut memperkuat ketegangan dan memunculkan rasa ketidakpuasan di kalangan struktur partai. Selain itu, intervensi politik dari koalisi eksternal dan aktor-aktor di luar PKB memberikan tekanan tambahan yang memperuncing perbedaan sikap di internal partai. Situasi tersebut berdampak langsung pada melemahnya konsolidasi organisasi, terganggunya soliditas mesin partai, serta terpecahnya dukungan basis pemilih PKB di sejumlah wilayah strategis. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan partai melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penentuan calon, serta perlunya mekanisme resolusi konflik internal yang lebih efektif. Upaya-upaya tersebut dinilai krusial untuk mencegah terjadinya defeksi politik dan menjaga kohesi organisasi pada kontestasi elektoral berikutnya.

Kata Kunci : *Political defection, Partai Politik, PKB, Pilkada*

Abstract

This study examines the phenomenon of political defection and internal divisions within the National Awakening Party (PKB) in the process of nominating candidates for the 2024 Pasuruan Regency elections. Using a qualitative approach, this study utilizes in-depth interviews with party officials at the branch and regional levels, analysis of organizational documents, and media coverage to understand the dynamics of the conflict. Data analysis is conducted inductively through a process of reduction, presentation, and conclusion drawing, accompanied by thematic analysis to identify patterns of causes of division, the dynamics of candidate nomination, and their impact on electoral strategies. Source and technique triangulation is applied to enhance the validity of the findings. The results of the study show that internal divisions were triggered by competing interests among elites in determining candidates for regional leadership positions. The candidate selection mechanism, which was considered to not fully reflect the aspirations of grassroots cadres, further exacerbated tensions and led to dissatisfaction among party structures. In addition, political intervention from external coalitions and actors outside the PKB has put additional pressure on the party, exacerbating internal differences. This situation has had a direct impact on the weakening of organizational consolidation, disrupting the solidarity of the party machine and dividing the PKB's voter base in a number of strategic areas. This study emphasizes the importance of strengthening party institutions through increased transparency and accountability in the candidate selection process, as well as the need for more effective internal conflict resolution mechanisms. These efforts are considered crucial to prevent political defections and maintain organizational cohesion in the next electoral contest.

Keywords : Political Parties, PKB, Local Elections (Pilkada)

PENDAHULUAN

Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghadapi tantangan besar dalam proses pengusungan calon kepala daerah. Salah satu persoalan utama adalah adanya indikasi perpecahan internal yang berpotensi mengganggu stabilitas partai dan memengaruhi hasil Pilkada. Fenomena ini relevan untuk dikaji lebih dalam karena berhubungan dengan dinamika internal partai politik dan pengaruhnya terhadap demokrasi lokal (Nurhasim, 2018; Aisah, 2018). Dalam konteks politik lokal Kabupaten Pasuruan, partai politik tidak beroperasi sebagai entitas yang solid, melainkan sebagai arena yang diwarnai oleh beragam kepentingan dan kelompok internal

yang saling berinteraksi maupun berkompetisi. Struktur internal partai di daerah ini kerap memperlihatkan dinamika faksional yang dipengaruhi oleh basis sosial, jaringan kiai pesantren, serta hubungan patronase yang telah mengakar lama dalam kultur politik lokal. Sejalan dengan pandangan Aisah (2018) bahwa Partai politik bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan sebuah struktur yang terdiri atas beberapa kelompok yang saling berkompetisi dan berbagi pendapat dan Nurhasim (2018) juga berpendapat bahwa Dinamika internal partai politik acap lekat dan tidak bisa di hindarkan dari faksi-faksi antarkubu yang di motori kader-kader partai politik realitas ini menunjukkan bahwa kehidupan partai di Pasuruan tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan antarkubu yang dimotori oleh kader-kader partai sendiri.

Kondisi tersebut diperkuat oleh karakteristik politik Pasuruan yang sangat dipengaruhi oleh jejaring personal dan afiliasi kultural keagamaan, sehingga sering kali keputusan politik di tingkat daerah tidak sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan partai di tingkat pusat. Akibatnya, terjadi ketegangan antara kepentingan elite daerah dengan struktur partai nasional, terutama dalam proses strategis seperti penentuan calon kepala daerah. Situasi ini menciptakan ruang bagi munculnya fragmentasi internal dan pergeseran loyalitas politik, sebagaimana terlihat dalam dinamika dukungan dan defeksi kader pada masa Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan (Orji-Obasi, 2024) "Demokrasi masa kini dibangun atas dasar politik partai politik." Namun, dinamika internal partai sering kali menciptakan tantangan tersendiri, seperti pembelotan politik yang disebut sebagai "kutukan politik partai." Pembelotan ini, yang terjadi ketika anggota partai berpindah ke partai lain, telah menjadi fenomena umum di berbagai negara, termasuk di Nigeria, dan menyebabkan ketidakstabilan politik serta menimbulkan pertanyaan moral tentang loyalitas politik (Orji-Obasi, 2024). Dalam konteks PKB, perpecahan internal yang terjadi selama proses pengusungan calon di Pilkada Kabupaten Pasuruan mencerminkan bagaimana konflik internal dapat mengubah persaingan politik dari yang ideologis dan fungsional menjadi personal dan pragmatis (Sartori, 2016).

Menurut (Sartori, 2016) "Secara keseluruhan, tidak ada yang menunjukkan

bagaimana dan mengapa persaingan internal partai dapat menjadi pengganti, atau setara dengan, persaingan antarpertai.” Argumen ini menunjukkan bahwa persaingan internal partai sering kali lebih bersifat pribadi dibandingkan fungsional, yang justru dapat melemahkan kohesi partai. Dalam kasus PKB di Kabupaten Pasuruan, konflik internal bukan sekadar ekspresi persaingan politik yang sehat, melainkan lebih sering dipicu oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu dalam memperebutkan posisi dan pengaruh. Proses pengusungan calon yang terfragmentasi menunjukkan kegagalan partai dalam merekayasa mekanisme politik yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif. Akibatnya, konflik ini menciptakan fragmentasi yang merugikan dan berpotensi melemahkan daya saing PKB di Pilkada.

PKB memiliki sejarah panjang sebagai salah satu partai politik berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU), yang memainkan peran penting dalam politik lokal dan nasional. Namun, seiring waktu, dinamika internal partai semakin dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis faksi-faksi yang ada di dalamnya. Faksi-faksi ini terbentuk berdasarkan hubungan personal, kepentingan pragmatis, dan perbedaan ideologis dalam menentukan calon pemimpin daerah yang akan diusung. Seperti yang dijelaskan oleh (Sharma, 2023), pembelotan politik tidak hanya mencerminkan ketidakstabilan internal partai tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dalam sistem politik monosentris, perpecahan intra-partai secara formal dilarang. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa perselisihan, persaingan, dan manuver tetap menjadi bagian tak terhindarkan dari proses politik internal (Sartori, 2016). Dalam proses pengusungan calon di PKB Kabupaten Pasuruan, dinamika ini terlihat jelas. Konflik kepentingan antara elite partai lokal, baik di tingkat DPD maupun DPC, sering kali menyebabkan polarisasi di antara kader dan pendukung partai. Selain itu, proses informal seperti lobi, negosiasi, dan persaingan antar-elite kerap memengaruhi hasil akhir seleksi kandidat. Hal ini menyebabkan kandidat yang diusung sering kali merupakan hasil kompromi yang tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak atau bahkan melemahkan kredibilitas partai di mata publik.

Konflik dalam proses kandidasi sering kali menjadi penyebab perpecahan partai. Misalnya, pada Pilkada Jawa Timur 2008, PKB terpecah akibat persaingan antara faksi Gus Dur dan Muhammin Iskandar. Peristiwa serupa terjadi pada Partai Golkar di Pilpres 2004 dan PPP pada Pilpres 2014, di mana konflik faksi dan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan strategis menyebabkan fragmentasi yang signifikan. Yang terbaru, pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang notabene merupakan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, namun diusung oleh partai yang selama ini dianggap sebagai rival politik PDI-P, yaitu Partai Gerindra. Kecenderungan konflik internal bukan disebabkan perbedaan visi- misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik serta kepentingan kekuasaan (Romli, 2017). Faktor-faktor seperti dominasi elite partai, intervensi eksternal, dan ketiadaan mekanisme seleksi yang transparan sering kali menjadi penyebab utama konflik tersebut.

Pada pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, konflik internal PKB semakin kompleks dengan adanya defeksi politik, di mana beberapa kader utama mendukung kandidat dari partai lain atau bahkan berpindah partai. Faktor eksternal, seperti perubahan peta koalisi di tingkat nasional dan provinsi, juga turut memengaruhi dinamika internal partai. PKB Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara mengikuti arahan pusat dan mempertimbangkan dinamika lokal yang spesifik. Gus Shobih merupakan salah satu kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah lama berkiprah dalam dunia politik. Berdasarkan pemberitaan Warta Bromo (2024), kiprahnya di dunia legislatif telah dimulai sejak 1997 sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, dan selama kariernya ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di berbagai komisi DPRD. Dengan pengalaman panjang tersebut, Gus Shobih dikenal memiliki basis politik yang kuat serta jejaring yang luas, baik di lingkungan internal PKB maupun di kalangan pesantren.

Memasuki pertengahan tahun 2024, mulai beredar isu mengenai keterlibatan Gus Shobih dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Pasuruan. Ia dikabarkan akan maju sebagai

bakal calon wakil bupati mendampingi calon bupati yang diusung Partai Gerindra. Menurut beritaplus.id (5 Agustus 2024), sejumlah tokoh ulama Bangil bersama pengurus DPC Gerindra Kabupaten Pasuruan tengah membahas beberapa nama potensial, dan nama Gus Shobih disebut sebagai salah satu kandidat paling kuat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik lokal di Pasuruan tidak hanya didorong oleh kalkulasi ideologis, tetapi juga oleh jejaring sosial dan komunikasi antar-elite lokal (Beck, 2002; Sharma et al., 2023). Isu ini semakin menguat setelah pada 9 Agustus 2024, WartaBromo menurunkan laporan yang menampilkan profil Gus Shobih sebagai figur yang berpotensi mendampingi M. Rusdi Sutejo. Dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan bahwa meskipun masih tercatat sebagai kader PKB, namanya mulai dikaitkan dengan Gerindra dan bahkan dianggap berpotensi “melawan” sesama kader PKB, yaitu Gus Mujib Imron.

Menanggapi hal itu, Gus Shobih memberikan klarifikasi pada 16 Agustus 2024 melalui beritajatim.com. Ia menyampaikan bahwa meskipun isu pencalonannya sebagai wakil bupati pendamping M. Rusdi Sutejo sudah ramai diberitakan, secara resmi belum ada pembicaraan maupun keputusan politik yang final. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran tersebut apabila terdapat kesepahaman dan tujuan yang sejalan, dengan alasan bahwa “politik itu dinamis” (beritaplus.id). Dua minggu kemudian, pada 28 Agustus 2024, pasangan Rusdi Sutejo– Shobih Asrori resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2024, dengan dukungan dari 12 partai politik termasuk Gerindra (Harian Bhirawa). Selanjutnya, pada 9 Januari 2025, KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan keduanya sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025–2030 (Pemerintah Kabupaten Pasuruan).

Di sisi lain, dinamika politik lokal Kabupaten Pasuruan semakin menarik ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengumumkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada 2024, yakni Gus Mujib Imron sebagai calon bupati dan Neng Wardah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

sebagai calon wakil bupati. Keputusan koalisi antara PKB dan PDIP ini menandai langkah strategis partai dalam mempertahankan basis elektoral tradisionalnya sekaligus memperluas dukungan lintas partai di tingkat lokal. Namun, pengumuman tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan politik. Sebelum nama Gus Mujib Imron dan Neng Wardah diumumkan secara resmi, banyak pihak memperkirakan bahwa Gus Shobih yang juga merupakan kader senior PKB dengan pengaruh kuat di wilayah Bangil dan sekitarnya akan menjadi salah satu kandidat potensial. Absennya nama Gus Shobih dalam daftar calon resmi PKB kemudian memunculkan spekulasi bahwa dirinya telah menjalin komunikasi politik dengan kubu lain, yakni Partai Gerindra, untuk maju sebagai calon wakil bupati mendampingi M. Rusdi Sutejo. Isu ini semakin menguat setelah sejumlah media lokal melaporkan bahwa nama Gus Shobih masuk dalam radar koalisi Gerindra pada awal Agustus 2024.

Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ketegangan internal yang terjadi di tubuh PKB Kabupaten Pasuruan pasca disingkirkannya Gus Irsyad Yusuf ketua DPC PKB sebelumnya yang dikenal memiliki hubungan politik yang kurang harmonis dengan Ketua Umum DPP PKB, Muhammin Iskandar. Ketegangan antara faksi Gus Irsyad dan faksi DPP PKB menciptakan fragmentasi politik di tingkat daerah, di mana sebagian kader merasa tidak terakomodasi dalam keputusan strategis partai, termasuk dalam proses pengusungan calon kepala daerah.

Dalam konteks ini, langkah politik Gus Shobih dapat dibaca sebagai manifestasi dari ketidakpuasan terhadap arah politik PKB pasca perubahan kepemimpinan lokal. Kecenderungan untuk berpindah haluan dari partai asal menuju koalisi partai lain menunjukkan bahwa dinamika politik di Pasuruan sangat dipengaruhi oleh faktor personal, relasi patron-klien, serta kepentingan elektoral yang pragmatis. Fenomena ini sejalan dengan temuan Nurhasim (2018) bahwa faksionalisasi di tubuh partai sering kali tidak hanya didorong oleh perbedaan ideologis, tetapi juga oleh kepentingan individu dan jaringan kekuasaan yang saling berkompetisi dalam memperebutkan posisi strategis di tingkat lokal. Selain itu, pengusungan pasangan Gus Mujib Neng Wardah juga

memperlihatkan bagaimana PKB mencoba mempertahankan kendali strukturalnya di Kabupaten Pasuruan dengan cara membangun aliansi baru bersama PDIP. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut justru memperdalam perpecahan di internal partai karena sebagian kader lama merasa tersisih dari proses politik. Dalam situasi seperti ini, munculnya Gus Shobih sebagai calon dari koalisi rival (Gerindra) menjadi simbol dari defeksi politik kader lama yang merasa terpinggirkan oleh arah baru kepemimpinan partai.

Dengan demikian, kasus ini menggambarkan bagaimana politik lokal Pasuruan tidak hanya bergerak di atas basis ideologis, tetapi juga diwarnai oleh dinamika personal dan faksional yang kompleks. Ketegangan antara faksi Gus Irsyad, Gus Mujib, dan Gus Shobih memperlihatkan bahwa kontestasi Pilkada 2024 bukan hanya pertarungan elektoral antarkandidat, tetapi juga representasi dari perebutan legitimasi dan pengaruh di dalam tubuh PKB itu sendiri (Sartori, 2016; Boucek, 2009; Nurhasim, 2018). Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana dinamika internal PKB di Kabupaten Pasuruan mengalami tekanan serius menjelang Pilkada 2024. Fenomena defeksi politik di mana sejumlah kader utama justru memberikan dukungan kepada kandidat dari partai lain atau bahkan berpindah haluan politik menjadi indikasi terjadinya pergeseran orientasi politik di tubuh partai. Di sisi lain, perubahan konstelasi koalisi di tingkat nasional dan provinsi turut memperkuat dinamika tersebut.

PKB di tingkat daerah dihadapkan pada dilema untuk menjaga keseimbangan antara mengikuti arahan partai pusat dan menyesuaikan diri dengan realitas politik lokal yang sangat cair. Pencalonan Gus Shobih yang berasal dari keluarga besar PKB oleh Partai Gerindra, yang secara tradisional merupakan rival politik lokal PKB, mencerminkan pragmatisme politik yang kerap kali melampaui batas-batas ideologis (Downs, 1957; Sartori, 2016). Dengan demikian, kasus Gus Shobih bukan sekadar mencerminkan perjalanan politik individu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana politik lokal di Kabupaten Pasuruan bergerak dalam ruang negosiasi yang kompleks. Dalam ruang tersebut, kepentingan elektoral dan strategi pemenangan sering kali lebih dominan dibandingkan dengan konsistensi ideologi partai (Aisah, 2018; Romli, 2018).

Secara lebih luas, perpecahan internal dalam proses kandidasi ini juga mencerminkan kelemahan institusional partai dalam mengelola aspirasi dan kepentingan yang beragam di dalam tubuhnya. Ketiadaan mekanisme yang transparan dan inklusif dalam menentukan kandidat sering kali menjadi penyebab utama konflik internal. Proses kandidasi yang tidak demokratis membuka ruang bagi dominasi elite tertentu dan mengabaikan aspirasi akar rumput, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada fragmentasi partai. Hal ini tidak hanya berdampak pada stabilitas internal partai, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap PKB sebagai salah satu aktor politik utama di Pasuruan. Ketidaksolidan internal partai dapat melemahkan daya saing kandidat yang diusung, mengurangi elektabilitas partai, dan memengaruhi efektivitas pemerintahan lokal apabila kandidat yang terpilih tidak didukung penuh oleh struktur partai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu perpecahan internal di PKB selama proses pengusungan calon pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, serta menelaah dampaknya terhadap stabilitas partai, elektabilitas kandidat, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Berangkat dari fenomena perpecahan politik dalam tubuh partai politik, studi ini berupaya menganalisis dinamika political defection dalam konteks politik elektoral, khususnya pada proses pengusungan calon kepala daerah oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilkada 2024. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana dinamika internal PKB, terutama dalam pengambilan keputusan politik, dipengaruhi oleh faktor-faktor rasional dan faksional yang berkembang di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena sesuai dengan tujuan untuk memahami makna, dinamika, dan proses sosial yang terjadi di tubuh PKB pada saat perpecahan internal berlangsung. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pemahaman bahwa penelitian kualitatif berfungsi menafsirkan fenomena dalam konteks alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Anggito, 2018). Penelitian kualitatif juga lebih menekankan makna daripada generalisasi, sehingga relevan untuk

mengungkap cara aktor politik memaknai konflik dan proses pengusungan calon. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus PKB Pasuruan, anggota yang terlibat dalam konflik internal, calon yang diusung, serta pengamat politik untuk memahami penyebab perpecahan dan dinamika defeksi politik. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dalam rapat internal partai dan kegiatan kampanye untuk menangkap langsung interaksi antaraktor. Dokumen internal partai, seperti notulen rapat, surat keputusan, dan surat pengunduran diri, juga dianalisis sebagai bagian dari sumber primer. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, laporan penelitian terkait perpecahan partai dan defeksi politik, pemberitaan media, serta data statistik pemilu sebelumnya untuk memberikan konteks lebih luas mengenai pola perilaku politik di Kabupaten Pasuruan. Data sekunder ini dipakai untuk memperkuat analisis empiris dan memvalidasi informasi dari lapangan (Sugiyono, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali alasan dan perspektif aktor mengenai konflik internal. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mencatat dinamika politik yang berlangsung dalam kegiatan formal maupun informal partai. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengecek keabsahan informasi melalui dokumen tertulis, foto, atau arsip lain (Wekke, 2019). Analisis data dilakukan secara induktif mengikuti model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola terkait penyebab perpecahan, proses pengusungan calon, serta dampaknya terhadap strategi dan elektabilitas calon. Selain itu, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Meskipun bersifat subjektif, peneliti menjaga kualitas penelitian melalui ketelitian analisis dan konsistensi prosedur sesuai anjuran Samiaji Sarosa (2021).

Penyajian data dilakukan secara naratif dengan menggabungkan kutipan wawancara, catatan observasi, dan dokumen partai untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena perpecahan internal PKB serta pengaruhnya terhadap pengusungan calon dalam Pilkada Pasuruan 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai political defection dan perpecahan internal PKB pada Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024 didasarkan pada temuan penelitian terdahulu yang menyoroti akar pembelotan politik, dinamika konflik internal, serta faktor elektoral yang memengaruhi perilaku elite partai. Babeiya (2022) menunjukkan bahwa pembelotan dipicu oleh lemahnya demokrasi internal, ambisi personal, keuntungan prospektif, serta keterbatasan regulasi, sedangkan Sharma et al. (2023) menegaskan bahwa pembelotan memiliki dampak destabilisasi terhadap stabilitas demokrasi, terutama ketika celah hukum memungkinkan pembelot mempertahankan posisi politiknya. Perspektif mikro dari Beck (2002) memperlihatkan bahwa jaringan sosial personal dapat mempercepat pembelotan melalui pengaruh interpersonal, sementara Fiorina & Abrams (2008) menyoroti bagaimana polarisasi elite tidak selalu mencerminkan polarisasi publik, namun dalam konteks lokal seperti Pasuruan, ketegangan elite berpotensi langsung memecah basis pemilih.

Kerangka konseptual penelitian ini juga didukung oleh definisi political defection yang dikemukakan Babeiya (2022) dan Orji-Obasi (2024), serta pandangan Khosla & Vaishnav (2024) bahwa fragmentasi internal dapat menjadi katalis pembelotan. Pemahaman mengenai politik elektoral dari Budiardjo (2008), Schmitter & Karl (1991), Norris (2004), serta Hague, Harrop & McCormick (2019) memperlihatkan bahwa kontestasi elektoral merupakan arena strategis tempat aktor berkompetisi untuk legitimasi politik. Sementara itu, teori faksionalisme dari Sartori (2016), Boucek (2009), Haris (2018), dan Aisah (2018) menunjukkan bahwa konflik internal merupakan gejala struktural akibat perebutan pengaruh dan kegagalan elite dalam mengelola kepentingan. Keseluruhannya

dipertegas oleh teori Rational Choice (Downs, 1957; Riker, 1962), yang menjelaskan bahwa pembelotan elite PKB merupakan tindakan rasional untuk memaksimalkan keuntungan politik ketika mekanisme internal dianggap tidak lagi menguntungkan. Dengan demikian, seluruh literatur ini membentuk dasar analisis untuk memahami pola, penyebab, dan konsekuensi perpecahan internal PKB dalam Pilkada Pasuruan 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpecahan internal PKB pada proses pengusungan calon Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024 berakar pada tiga sumber utama: pertarungan faksi elite, ketidakakteraturan mekanisme kandidasi, dan munculnya pembelotan kader kunci. Struktur internal PKB di Pasuruan memang tidak solid; ia terbentuk dari jaringan kiai, tokoh pesantren, elite lokal, dan kelompok kepentingan yang memiliki aspirasi berbeda. Wawancara dan observasi lapangan memperlihatkan bahwa sejak awal proses kandidasi, faksi-faksi di PKB sudah menunjukkan ketegangan, terutama antara kelompok yang ingin mempertahankan kontrol partai dengan kelompok yang ingin mendorong nama baru yang dianggap lebih kompetitif. Ketegangan ini semakin meningkat karena proses seleksi kandidat di tingkat kabupaten tidak berjalan transparan dan tidak seluruh faksi dilibatkan secara proporsional. Situasi ini menciptakan rasa ketidakpuasan, terutama pada aktor-aktor lokal yang merasa keputusan diambil berdasarkan kepentingan elite tertentu, bukan aspirasi struktural dan basis pemilih PKB.

Di tengah ketegangan internal tersebut, fenomena pembelotan muncul sebagai titik balik yang memperdalam konflik. Kasus paling mencolok adalah Gus Shobih, seorang tokoh PKB yang memiliki rekam jejak panjang di DPRD dan jaringan politik pesantren yang kuat. Ketika ia muncul sebagai kandidat potensial untuk Pilkada, sebagian pengurus PKB justru tidak mendukung, sehingga membuka ruang bagi partai lain khususnya Gerindra untuk memanfaatkan momentum itu. Ketika Gus Shobih kemudian mendapat dukungan dari jaringan ulama dan struktur Gerindra, sejumlah kader PKB ikut menyertai dan secara terbuka berpindah dukungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas kader PKB di Pasuruan cenderung lebih ditentukan oleh afiliasi personal dan patronase lokal daripada garis kebijakan partai. Pembelotan ini juga memperlihatkan lemahnya

kemampuan partai mengelola aspirasi internal, sehingga konflik personal berubah menjadi fragmentasi struktural.

Perpecahan internal ini memiliki dampak langsung terhadap kekuatan elektoral PKB di wilayah tersebut. Observasi kampanye memperlihatkan adanya penurunan soliditas mesin partai, terutama karena beberapa jaringan pesantren yang biasanya menjadi basis kuat PKB terbelah mendukung calon lain. Di tingkat struktur, pengurus DPC dan DPAC tidak berjalan seragam; sebagian aktif menggerakkan mesin pemenangan, tetapi sebagian lain pasif atau bahkan memberi dukungan diam-diam kepada kandidat dari luar PKB. Kondisi ini membuat PKB tidak mampu menampilkan konsolidasi politik yang efektif saat memasuki masa kampanye. Selain melemahkan daya saing kandidat yang diusung PKB, fragmentasi internal juga memberi kesan kepada publik bahwa PKB kehilangan kendali atas dinamika internalnya.

Dari sisi proses politik, penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan mekanisme kandidasi merupakan penyebab paling signifikan terjadinya konflik. Tidak ada mekanisme yang benar-benar mampu menampung aspirasi faksi-faksi, baik melalui forum resmi maupun musyawarah internal. Dominasi elite tertentu membuat proses seleksi kandidat dianggap tidak demokratis dan tidak mencerminkan aspirasi basis. Akibatnya, keputusan partai tidak memperoleh legitimasi penuh, dan ruang resistensi terbuka lebar. Hal ini menjelaskan mengapa pembelotan dapat terjadi secara terbuka dan mendapat dukungan dari sebagian besar jaringan akar rumput.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa perpecahan internal PKB dalam pengusungan calon Pilkada Pasuruan 2024 bukan sekadar persoalan konflik personal, tetapi mencerminkan problem struktural dalam manajemen partai di tingkat lokal. Ketidakmampuan partai mengelola faksi, ketidakterbukaan proses kandidasi, serta kuatnya politik patronase di tingkat basis menjadi faktor utama yang memicu defeksi politik. Dampaknya tidak hanya pada kesolidan internal partai, tetapi juga pada elektabilitas calon, kepercayaan publik, dan efektivitas PKB sebagai aktor politik lokal.

Perpecahan Internal dan Pembelotan Politik dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, perpecahan internal dan pembelotan politik seperti yang terjadi dalam tubuh PKB pada Pilkada Pasuruan 2024 dapat dipahami sebagai bentuk melemahnya nilai persatuan dan amanah yang seharusnya menjadi dasar setiap aktivitas politik. Islam menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan menghindari perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial. Ketika faksi-faksi dalam partai saling bersaing secara tidak sehat dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kemaslahatan bersama, hal itu menunjukkan bahwa prinsip persatuan yang diajarkan Islam tidak terjaga dengan baik. Konflik politik yang didorong oleh ambisi pribadi maupun kepentingan jangka pendek bukan hanya merusak struktur internal organisasi, tetapi juga menimbulkan fitnah yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan.

Selain itu, proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dalam penjaringan calon bertentangan dengan nilai syura atau musyawarah yang menjadi prinsip penting dalam politik Islam. Syura menuntut keterbukaan, partisipasi, dan dialog di antara para pemangku kepentingan, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan aspirasi kolektif. Ketika mekanisme ini diabaikan, muncul ketidakpuasan yang akhirnya mendorong pembelotan kader. Pembelotan itu sendiri dapat dipandang sebagai tanda hilangnya amanah politik, karena jabatan dan dukungan politik dalam Islam bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, fenomena perpecahan PKB menunjukkan perlunya membangun kembali nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan amanah agar politik yang dijalankan sejalan dengan prinsip etika Islam dan menghindari kerusakan yang lebih luas.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perpecahan internal PKB dalam proses pengusungan calon Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024 terutama dipicu oleh pertarungan faksi elite, mekanisme kandidasi yang tidak transparan, dan ketidakmampuan partai mengelola perbedaan aspirasi. Ketegangan yang telah lama mengakar antara kelompok-

kelompok dalam PKB semakin tajam ketika proses seleksi calon dianggap tidak inklusif dan hanya menguntungkan elite tertentu. Kondisi ini membuka ruang resistensi dan membuat sebagian kader kehilangan legitimasi terhadap keputusan partai.

Munculnya pembelotan tokoh penting seperti Gus Shobih menjadi faktor yang memperdalam fragmentasi internal. Pembelotan tersebut menunjukkan bahwa loyalitas kader lebih bergantung pada patronase lokal dan kalkulasi politik rasional daripada garis kebijakan partai. Dampaknya terlihat pada melemahnya konsolidasi, terbelahnya dukungan jaringan pesantren, serta menurunnya efektivitas mesin pemenangan PKB. Oleh karena itu, PKB perlu memperbaiki mekanisme demokrasi internal, menguatkan manajemen faksi, dan memastikan proses kandidasi berjalan terbuka agar konflik serupa dapat dihindari pada kontestasi mendatang.

Referensi

- Aisah, P. B. (2018). *Faksi dan konflik internal partai politik: Koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi*. Jakarta.
- Babeiya, E. E. (2022). *Defection and its implications on party politics in Tanzania*. *Tanzania Journal of Development Studies*, 20(2).
- Beck, P. A. (2002). *Encouraging political defection: The role of personal discussion networks in partisan desertions to the opposition party and Perot votes in 1992*. *Political Behavior*, 24(4).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
- Fiorina, M. P., & Abrams, S. J. (2008). *Political polarization in the American public*. *Annual Review of Political Science*, 11, 563–588. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.153836>
- Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2019). *Comparative government and politics: An introduction* (11th ed.). Palgrave Macmillan.
- Khosla, M., & Vaishnav, M. (2024). *Democracy and defections*. *International Journal of Constitutional Law*, 22(2), 400–430. <https://doi.org/10.1093/icon/moae037>
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Madalina, M., & Adityanta, A. (n.d.). *Analisis terhadap mekanisme penyelesaian konflik internal partai politik ditinjau dari prinsip demokrasi*.
- Nurhasim. (2018). *Koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi: Dampak*

- faksi dan konflik internal partai. Jakarta.*
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press.
- Orji-Obasi, C. I. (2024). *A legal appraisal of the implication of political party defection in Nigeria democratic process*. Awka Capital Bar Journal, 3. <https://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pca/pca01/pca01a/mobile>
- Profil Gus Shobih politisi senior PKB yang santer diisukan akan melawan Gus Mujib di Pilkada. (2024, August 9). Wartabromo. <https://www.wartabromo.com/2024/08/09/profil-gus-shobih-politisi-senior-pkb-yang-santer-diisukan-akan-melawan-gus-mujib-di-pilkada/>
- Romli, L. (2018). *Koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi*. Jakarta.
- Sartori, G. (2005). *Parties and party systems: A framework for analysis*. ECPR Press.
- Sartori, G. (2016). *Parties and party systems: A framework for analysis*. ECPR Press. (Catatan: Jika ini duplikasi, pilih salah satu edisi yang Anda gunakan.)
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). *What democracy is...and is not*. Journal of Democracy, 2(3), 75–88.
- Sharma, P., Sinha, S., & Saini, V. K. (2023a). *The impact of political defection on democratic stability: A case study of India*. Research Review International Journal of Multidisciplinary, 8(6), 137–141. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n06.018>
- Sharma, P., Sinha, S., & Saini, V. K. (2023b). *The impact of political defection on democratic stability: A case study of India*. Research Review International Journal of Multidisciplinary, 8(6), 137–141. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n06.018>
- Syamsudin, H. (2018). *Koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi: Faksionalisasi dan konflik internal partai*. Jakarta.
- Tokoh ulama Bangil godok nama cawabup: Muncul Gus Shobih calon terkuat. (2024). Beritaplus.id. <https://beritaplus.id/news-3285-tokoh-ulama-bangil-godok-nama-cawabup-muncul-gus-shobih-calon-terkuat>
- Wahyuni, H., & Ayu, R. F. (2022). *Faksi dan konflik politik dalam partai politik: Partai Keadilan Sejahtera*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 15(1), 79–92. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2195>
- Wekke, I. S. (2019). *Metode penelitian sosial*. IAIN Sorong.
- Sary, D. V., Rahman, K., Prayuda, R., & Sundari, R. (2021). *Identification of potential and social welfare resources of coastal communities in the Regency of Meranti*.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, dan konstruksi*. Bandung: Alfabeta.